

KRITIK WAYANG KEMPLO TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN DI PONOROGO

Oleh: Nurul Iman

(Staf Pengajar Fakultas Agama Islam Unmuh Ponorogo)

email: cahayaiman66@gmail.com

ABSTRACT: *Puppet (Wayang) in its development has been used as media of entertainment, show, preaching, illumination, even social criticism. At Ponorogo, there was Wayang Kemplo which writes and tells stories of puppet figures in accordance with the local area reality and considered as a feedback or criticism towards some social realities, based on self anxiety of its puppeteer. This paper will examine the criticism of Wayang Kemplo againts the social dynamic of Ponorogo, particularly on the education and the academic society response towards these criticism. Among those things that can be summed up by this study, are: (1) Society, the education world in particular is a community that is supposed to be familiar with valuas such as honesty, hard working, discipline, etc. however, it showed that the reallity was as its opposite. Academic community often showed lies, laziness, and lack of discipline through purchasing the academic degree, cheating culture, or false scientific work. Those reality caused concern of the puppeteer to criticize them through his wayang kemplo, (2) The criticism of wayang kemplo was responded differently, some took it seriously and even tried to intimidate the author, mainly the criticized officials. Many also thought of it as an entertainment for its humor and jokes, so the presence of these posts were always eagerly anticipated.*

Keywords: *Social criticism, puppet (wayang), educational world*

PENDAHULUAN

Teori kritis sebagai usaha pencerahan yang berharap bahwa apabila rasionalitas semua sistem sudah disobek, maka kontradiksi-kontradiksi akan nampak jelas, dapat merangsang pematangan belenggu dan membebaskan manusia ke arah kemanusiaan yang sebenarnya. Dalam masyarakat industri maju, kontradiksi-kontradiksi, frustrasi-frustrasi, penindasan-penindasan tidak lagi nampak. Semua segi kehidupan masyarakat berkongkalingkong menimbulkan kesan bahwa semuanya baik adanya, semua kebutuhan dapat dipuaskan, semuanya efishen,

produktif, lancar, bermanfaat. Kesan semua itu harus dibuka (Suseno, 1992: 165-166).

Sebagai sebuah kritik, ide tulisan memang selalu lahir dari perspektif berbeda seseorang mengenai kehidupan dan berbagai permasalahannya. Menurut Sholihan dalam Jamil (2007: 4), hal ini disebabkan adanya berbagai latar belakang yang dimilikinya, seperti: sejarah dan karakter masing-masing orang, jenis kelamin, pandangan hidup, dan nilai yang dipegangi.

Kritik terhadap realita sosial dapat lahir dari dorongan keberagaman (religiusitas) seseorang, hal mana dapat disampaikan dalam berbagai bentuk dan cara, baik berupa omongan, tulisan, maupun tindakan nyata sebagai bentuk *inkar al-munkar* (mengkikari kemungkaran dan kebobrokan). Muslim Abdurrahman (Yusuf, 2006: 7) menyatakan bahwa agama merupakan sumber moralitas. Setiap kitab suci pasti berisi ajaran akhlak dan humanitas. Hanya saja, makna-makna dan etika agama ini secara hermeneutik baru muncul ketika ditafsiran oleh para pengikutnya melalui desakan sejarah (baca: peristiwa) dan sesuai dengan kepentingan sosial masing-masing.

Senada dengan Muslim, Achmad Munjid dalam Koran Tempo, edisi Selasa, 06 Maret 2007 menyebut kritik sosial agama berangkat dari maksud *amar ma'ruf nahi munkar* guna memperbaiki kenyataan dan menyongsong kehidupan bersama yang lebih lapang, sekaligus memberikan koreksi, revisi, dan apresiasi dengan panduan visi yang terang dan terbuka. Tanpa ada hujatan, hardik, dan pemaksaan atau kekerasan. Agama adalah tenaga yang mendorong umatnya untuk

berdialog dan bekerjasama menyelesaikan ketimpangan ekonomi. Agama hendaknya menjadi api nalar yang menghidupkan nalar, nurani, dan harapan (<http://gusdur.net/Opinion/Detail/?id=80/hl=id>).

Kajian kritis terhadap pendidikan menurut Nanang Martono (2010), dari kacamata sosiologi mempunyai tiga perspektif, yakni perspektif fungsional, konflik dan interaksi simbolik. Ketiga perspektif tersebut memandang praktik pendidikan dari sisi yang berbeda. Perspektif fungsional lebih banyak melihat fungsi positif lembaga pendidikan, sedangkan perspektif konflik justru melihat pendidikan berfungsi negatif karena menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan sosial. Kedua perspektif tersebut memang relevan untuk menggambarkan praktik-praktik pendidikan dewasa ini. Sementara itu, perspektif interaksionalisme simbolik melihat hubungan dan interaksi antar komponen pendidikan. Interaksi ini turut menentukan keberhasilan individu dalam proses pendidikan.

Sedangkan Paulo Freire menegaskan keharusan kemandirian pendidikan dan “pembebasan” penyelenggaraannya dari dominasi negara. Dalam bukunya *The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation*, Freire mempertentangkan antara dua model pendidikan, yaitu pendidikan yang membebaskan dan yang membelenggu. Menurutnya, pendidikan yang membelenggu dan telah mapan selama ini merupakan cerminan bentuk dominasi dan penjinakan sosial budaya (*social and cultural domestication*). Jika pendidikan kurang menghargai arti kebebasan yang dimiliki individu, maka ia hanya akan menghasilkan manusia-manusia yang terasing dan tercerabut (*disinherited masses*) dari

realitas dirinya (Fraire, 2002: 175). Dimensi politik pendidikan sebagaimana ditegaskan Fraire mengandung perlawanan terhadap kooptasi penguasa (elit kekuasaan), yang melalui serangkaian kebijakan bertujuan menjadikan pendidikan sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Keberhasilan kooptasi tersebut berupa ketundukan dan kepatuhan penyelenggaraan pendidikan pada kemauan penguasa, selanjutnya menyebabkan dunia pendidikan dalam kondisi “terbelenggu”. Karenanya, menurut Smith, kengototan Fraire dengan ide pembebasan pendidikan dilandasi oleh semangat *conscientizacao* (kesadaran) sebagai rumusan tujuan pendidikan yang digagasnya. *Conscientizacao* merupakan proses penyadaran yang mengandung pengertian bahwa setiap individu diajak untuk mampu melihat sistem sosial secara kritis. Dalam hal ini, mereka diajak untuk dapat memahami akibat-akibat yang saling kontradiktif dalam kehidupan, dapat menggeneralisasikan kontradiksi-kontradiksi tersebut dalam lingkungan lain di sekelilingnya dan dapat mentransformasikan masyarakat secara kreatif dan bersama-sama (Smith, 2001: 3). Pembebasan yang dirancang Fraire melalui proses penyadaran ini mengharuskan dunia pendidikan mencetak individu-individu yang secara sadar berusaha membangun diri sendiri dan masyarakat sekitar terlepas dari dominasi kelas dominan yang menghegemoni dalam struktur. Dalam konteks Indonesia, menurut Kadi dkk. (2009: 12), kesadaran seperti ini akan mendorong orang untuk secara mandiri menyelenggarakan pendidikan tanpa adanya “campur tangan” penguasa.

Darmaningtyas (2004: 21) menyebut pendidikan terlibat dalam proses penyengsaraan masyarakat. Masuknya produk-produk industri ke dalam institusi pendidikan telah berdampak pada penciptaan suasana pendidikan yang hiruk pikuk penuh dengan kegiatan bisnis sebagai ganti suasana yang menyegarkan dan mencerdaskan. Hiruk pikuk sekolah yang seperti pasar dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat, terutama pada saat permulaan tahun ajaran baru dan akhir tahun pelajaran. Orang tua disibukkan mencari uang tunai berkenaan dengan daftar ulang, seragam, buku pelajaran, ujian, ulangan umum, study tour, pengadaan rapor, uang perpisahan, dan lain sebagainya. Selain itu, masih terdapat pula pungutan-pungutan lain. Selain itu, menurut Darmaningtyas (2004: 27) pendidikan pada kenyataannya telah membelenggu seseorang yang mencapai tingkat pendidikan tertentu pada satu pilihan saja, sehingga membuat hidupnya semakin sengsara. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang disampaikan E.F Schumacher (1979) bahwa pendidikan adalah penyebaran idea yang memungkinkan orang memilih yang ini dan itu, atau untuk hidup sedikit lebih baik.

Wayang merupakan salah satu seni budaya Indonesia yang paling populer, yang terus berkembang dari masa ke masa. Meski asal usul wayang diperdebatkan, budaya Wayang dapat disebut sebagai budaya asli Indonesia yang berasal dari pulau Jawa, dan telah dikukuhkan oleh UNESCO sebagai *masterpiece of oral and intangible heritage of humanity* (warisan mahakarya dunia yang ternilai dalam seni beertutur). Dalam perkembangan kontemporer, kesenian Wayang merupakan media yang

mudah digunakan dalam penerangan, dakwah, pendidikan, pemahaman filsafat, hiburan, dan bahkan kritik sosial (Sukirno, 2012).

Wiraharjo (2011) menyebut Wayang Durangpo sebagai kritik sosial yang dilakukan ki dalang Sujiwo Tejo dengan menggunakan tokoh dan peristiwa tertentu mengacu pada epos Mahabarata dan Ramayana. Kritik sosial secara eksplisit maupun implisit ditujukan kepada Pemerintah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun masyarakat. Penyampaian kritik tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat. Dalam kenyataannya, kritik sosial tersebut juga sering diartikan sebagai hiburan oleh para pembaca. Pada makna ini, masyarakat pembaca lebih memperlakukan teks Wayang Durangpo sebagai teks hiburan daripada 'manuskrip' yang memuat kritik sosial.

Pada ranah lokal Ponorogo, terdapat Wayang Kemplo Gerr yang menyuarakan kritik terhadap berbagai realitas sosial, sesuai dengan kegelisahan diri sang dalang. Wayang Kemplo sejatinya merupakan salah satu rubrik yang secara rutin telah terbit dalam Koran *Media Mataraman* sejak tahun 2010 silam.

Pemilihan media kritik dalam bentuk tulisan sebagaimana dilakukan dalang Wayang Kemplo merupakan fenomena baru yang berlaku dalam dunia kritik sosial. Berbeda dengan kritik dalam pagelaran wayang kulit yang membutuhkan banyak biaya dan mengharuskan dukungan banyak kru, maka kritik lewat tulisan dapat rutin dilakukan setiap minggu seiring terjadinya dinamika sosial yang begitu cepat, tanpa mempertimbangkan aspek ekonomis. Kritik dalam bentuk tulisan dapat pula mengundang respon pembaca berupa tanggapan tulisan balik.

Sebuah pembelajaran berharga bagi upaya menumbuhkan kreatifitas ilmiah khususnya dalam dunia tulis menulis di media cetak (Iman, 2013: 2).

Berdasar para uraian tersebut, artikel ini akan mengkaji kritik Wayang Kemplo terhadap dinamika sosial Ponorogo, khususnya dunia pendidikan serta tanggapan masyarakat akademik terhadap kritik tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang kritik sosial ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan inquiry filosofis dan heuristik. Pendekatan pertama digunakan untuk mengkaji nilai-nilai yang dipegangi oleh individu penyampai kritik (dalang) yang menjadi nyata dan digejalakan dalam bentuk tulisan Wayang Semprot. Penelitian filosofis didasarkan pada isu dan ide dari perspektif literatur, menguji atau menelaah secara mendalam mengenai makna suatu konsep. Sedangkan pendekatan heuristik atau psikologi humanistik digunakan untuk melihat pengalaman seseorang dan respon yang diberikan terhadap suatu fenomena. Dalam penelitian ini, pengalaman dan respon tersebut dikaitkan dengan kritik yang diterima (Fathan, 2005: 61).

Sumber primer penelitian berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tulisan wayang semprot serta respon/tanggapan masyarakat terhadapnya. Sedangkan sumber sekundernya adalah seluruh kepustakaan pendukung yang memiliki keterkaitan dan dapat memperkuat data-data primer.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis model Bogdan dalam Muhadjir (1989:171), yakni analisis akan dilakukan baik di lapangan maupun setelah meninggalkan lapangan. Terhadap data lapangan dilakukan penghalusan bahan empirik yang masih kasar ke dalam laporan, dan selanjutnya diadakan penyederhanaan data menjadi beberapa unit informasi yang rinci tetapi sudah terfokus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Seputar Wayang Kemplo

Penulis *Wayang Kemplo* adalah Setyo Handono atau yang lebih dikenal sebagai Ki Setyo Handono atau Ki Setyo Racethocarito, lahir di Pacitan, 7 September 1966. Pendidikan tingginya ditempuh mulai dari D3 Senirupa IKIP Surabaya (UNESA), S1 Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP PGRI Ponorogo, dan S2 Kebijakan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kegemarannya untuk mengajar disalurkan dengan melibatkan diri sebagai guru negeri (PNS) dalam jajaran Dinas Pendidikan Ponorogo dan sebagai dosen luar biasa di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Keterikatan secara dinas tidak menghalangi daya kritisnya sebagai penulis dan seniman untuk menuangkan curahan hati dan kegelisahan akademisnya dalam bentuk tulisan. Karya tulisnya dalam bentuk artikel terus terlahir seiring pergumulannya dengan sosial dan dunia akademik yang setiap hari digeluti. Adapun pengalaman

panjang dalam dunia tulis menulis diawali dari Majalah *Jakarta-Jakarta* (1989), Penulis Materi Pelajaran Seni (Intan Pariwara 2004), Penulis Fiksi *Wayang Semprot* (Ponorogo Pos, 2004-2009), Penulis Artikel di *Majalah Pendidikan Jatim*, Surabaya (2004-2013), Penulis *Wayang Kemplo* (Media Mataraman- Sekarang), Penulis *Wayang Semprot* (Majalah *Jemparing* 2010-sekarang), Komikus (Majalah *Jemparing*) (Wawancara Ki Setyo Handono, 31 Mei 2013).

Kumpulan tulisannya *Wayang Semprot* pernah akan diterbitkan oleh sebuah percetakan Surabaya, namun dalam kenyataannya naskah yang telah disodorkan kepada penerbit *klendran* (hilang) bersamaan dengan terhapusnya file kumpulan tulisan tersebut dalam komputer sang dalang. Hanya beberapa naskah yang dapat “diselamatkan”. Sedangkan tulisannya *Wayang Kemplo Gerr* yang mewarnai media lokal Ponorogo, *Media Mataraman* dalam tiga tahun terakhir telah menjadi kumpulan naskah buku yang siap diterbitkan dalam waktu dekat.

B. Kritik Wayang Kemplo terhadap Pendidikan Ponorogo

Artikel-artikel dalam *Wayang Kemplo Gerr* jika dicermati secara mendalam tampak merupakan ungkapan keprihatian sosok sang dalang terhadap berbagai fenomena sosial, politik, keagamaan, dan pendidikan yang terjadi dan melingkupi kehidupan di wilayah lokal Ponorogo. Berbekal keinginan untuk turut “meluruskan” keruwetan dan arah fenomena tersebut, maka keprihatinan sang dalang dituangkan dalam media wayang yang merujuk pada budaya

Jawa yang diakrabi masyarakat agar lebih mengena dan komunikatif.

Dalam hal ini Ki Setyo Handono menegaskan:

Carut marut keadaan sosial masyarakat baik berkenaan dengan penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan, maupun pendidikan. Media wayang dipilih karena berbasis budaya Jawa yang dikenal masyarakat. Media ini juga lebih komunikatif. Kritik secara *satir* disampaikan dengan tidak menyebut secara langsung nama dan pelaku peristiwa. Meski demikian bukan berarti tidak ada yang kebakaran jenggot dan marah-marah (Wawancara, 31 Mei 2013).

Kritik yang disampaikan Ki Setyo Handono melalui *Wayang Semprot* dan *Wayang Kemplo* direspon beragam oleh banyak kalangan. Bagi para pembaca umum, kritik tersebut memberikan jalan bagi kegundahan hati berkenaan berbagai peristiwa ketidakadilan penguasa maupun kesemerawutan fenomena sosial di tingkat lokal. Bagi penguasa dan pemegang kebijakan yang kebetulan sedang di-*sentil* sang dalang, kritik tersebut menuai antipasti dan penolakan. Tidak berlebihan, jika artikel wayang tersebut juga mendapat “pencekalan” dari pihak-pihak tertentu. Selain itu, kritik tersebut juga berimbas pada perlakuan intimidatif dalam karirnya sebaga PNS daerah. Dalam hal ini Ki Setyo menegaskan:

Pernah, misalnya lewat institusi tempat saya mengajar (sekolah menengah negeri). Saya dimutasi ke sekolah lain tanpa alasan lain. Selain itu intimidasi berupa “pemblokiran” akses saya untuk menerbitkan artikel di media tertentu. Menurut bocoran yang saya terima, ada media Koran nasional yang *ditapuk duwit* sampai 60 juta, untuk tidak menerbitkan artikel Wayang Semprot saya. Selain itu ada media lokal Ponorogo yang “dibeli” sebesar 12 juta untuk memboikot artikel tersebut. Tapi semuanya tidak menyurutkan niat dan kemauan saya untuk turut meluruskan ketimpangan-ketimpangan sosial (Wawancara, 31 Mei 2013).

Bagi sebagian masyarakat lain, artikel *wayang kemplo* sering diperlakukan sebagai bacaan hiburan yang selalu dinanti

kehadirannya disebabkan banyol, guyonan, dan humor-humor *mbeling* yang terkandung di dalamnya. Keterlambatan atau ketidakhadiran tulisan selalu dipertanyakan kepada redaksi Koran maupun penulis melalui telpon atau SMS.

Tulisan wayang selanjutnya mengambil bentuk kritik sosial yang secara dominan menyoroti penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan eksekutif, produktivitas kepemimpinan, rekrutmen pegawai, jual beli jabatan, mutasi jabatan, *mark up* APBD, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta premanisme dalam pemerintahan. Berkenaan dengan legislatif, tulisan sang dalang *Wayang Kemplo* menyoal tentang “penghianatan” DPR terhadap amanat rakyat, kunjungan keja (kunker), serta kesan imunitas wakil rakyat terhadap hukum. Sebagian artikel *Wayang Kemplo* juga berisi renungan dan motivasi spiritual tentang hakikat keimanan, puasa Ramadhan, Haji, Idul Fithri, perang terhadap kebatilan, serta sosok pemimpin sejati.

Jika dalam artikel kritik *Wayang Kemplo* terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan lebih banyak merujuk pada cerita pewayangan, hikmah dan pitutur jawa, maka berkenaan dengan renungan dan motivasi spiritual, sang dalang banyak merujuk dalil dari Al-Qur’an dan Hadis. Kenyataan ini menegaskan bahwa selain memiliki basis keilmuan dalam bidang seni dan bahasa, sang dalang menguasai bidang agama dengan baik.

Khusus berkenaan dengan keprihatinan dalam bidang pendidikan, kritik sosial sang dalang menyoroti masalah gelar akademik palsu, ujian nasional (UNAS), profesionalitas guru,

“pemerasan” terhadap guru, sertifikasi guru, plagiarisme dalam karya ilmiah, serta penyelenggaraan RSBI. Diantara judul artikel wayang *Wayang Kemplo* berkenaan aspek pendidikan adalah “Gelar Akademik Tumbasan”, “*Mituhu Dawuhing* Guru”, “Bimo UNAS”, “Gelar Gak Ngefek”, “Jadikan Guru Sapi Perah”, “Guru Profesional”, “UKG (Ujian Kur Guyon)”, “Karya Ilmiah Palsu”, “RSBI”, “Magister Sekedar Iseng”, “Kolektor Gelar Instan”, dan “Coreng Moreng Pendidikan Ponorogo”.

Dalam artikel yang berjudul “Bimo UNAS” sang dalang bercerita secara imajinatif tentang Bimosena dan nasehat ibunya saat akan menjalani ujian nasional (Handono, 2013: 119). Sang ibu perpesan tentang kejujuran, keikhlasan diri, kecerdasan, kerja keras dan sebaliknya menghindari rekayasa jawaban, dan akal-akalan. Perilaku kebobrokan mental pejabat dan KKN mereka, menurut sang ibu disebabkan kebiasaan tidak jujur ketika belajar dahulu.

“... Malah ora mung jujur thok. Ananging ujian mono kudu dilakoni kanthi ikhlas, cerdas, kerja keras, lan kerja tuntas. Lan aku ora sudi menawa asile mengko awujud angka-angka katrolan, luwih-luwih mung akal-akalan. Lan aku duwe pangajab, menawa pasinaon ing Ngamarta suk, ora usah ngiblat marang budayane wong Barat. Entek-entekane mung dadi bangsa ora gelem makarya abot. Dadi pejabat, ya pejabat bejat. Males nyambutgawene. Seneng ngumbar syahwat, ngujo donya lali akhirat. Ijasah tukon, selingkih di mana-mana. Korupsi, kolusi, nepotisme merajalela. Prestasine nol puthul. Yen ana pejabat sing kaya mangkono bakal tak uncalne ning jurang kanisthan...”

Lebih lanjut pesan moral artikel ini juga berkenaan dengan anjuran tidak tergesa-gesa dan berpikir jernih sebelum bertindak, mengekang nafsu, asal penciptaan, larangan untuk takabur, dan sikap saat nanti merengkuh kesuksesan dan jabatan.

“...Jaganen jiwa lan ragamu. Aja pijer sira leren ndedonga, aja grusa-grusu sabarang tumindak, mepera hawa nepsumu, pikiren kanthi lantip. Elinga ya ngger, awake dewe iki cinipta dening Gusti Kang Akarya Jagad, mula aja sombong lan takabur, awit awake dewe iku mung makhluk ciptaanne. Suk yen cita-citamu golek tirta pawitra suci wis kaleksanan, Ibu meling yen kowe besuk dadi pejabat, ya dadiya pejabat sing luhur pambudine. Aja adigang adiguna, sapa sira sapa ingsun. Mangertiya ya ngger, jabatan ngono mung sedela, sak wayah-wayah bisa dicabut, musna. Wong iku yen wis ilang jabatane, entek-entekane ya kaya wayang ilang gapite. Nglempruk tanpa daya. Jabatan ngibarate mung klambi. Aja dinggo tumindak sak wenang-wenang....yo ngger”

Sedangkan dalam “Mendem Gelar” sang dalang menuturkan kisah fiktif tentang Dityo Buto Terong yang digoda dan dikerjai oleh Gareng dan Petruk (Handono, 2013: 131) Buto Terong diceritakan sebagai *buto mendo tur bejo*, yang meskti tidak pinter dan tidak berpendidikan, tetapi menjadi orang penting dan menjabat sebagai Adipati Tibaskara. Bahkan sang Adipati Buto Terong mendapatkan gelar akademik tanpa harus menempuh studi. Gareng berkata:

“Opo!!!, kowe iki dadi adipati!!!!, aduh duh duh duh... Truk!!!, kupingku tambah mumet, wetengku tambah ora krungu.... Aduh duh...duh..duh, lha wong moco wae ora godak lha kok dadi adipati...aduh...duh duh... gek sopooo sing milih kowe biyen... mesti wong mendho-mendho kabeh.... Gek arep dadi opoooo negoro iki yen pemimpine koyo kowe kuwiiii... aduh duh duh.... Gek lakon opo iki... oalaaaah ndonya...ndonya lha kok iki ono wahyu nyasar, pulung mendho tumurun....oalahh dewo... dewo... Ora! Kowe mau ngomong oleh gelar???, gek gelar opo maneh kuwi !!!”

Petruk juga menimpali:

“Heh, sak umpomo gelem ngono wis biyen-biyen aku nganggo gelar. Nanging kanggoku gelar mau kudu sumbut karo kemampuane, lan uga bener anggone sekolah utowo kuliahe. Mulo aku ora sudi nganggo gelar koyo kowe kuwi. Ngisin-isini, ngapusi hati nurani, terus nggo opo gelar kuwi. Lha wong nyatane ora ngefek blas karo kepinteranmu...”

Selanjutnya berkenaan dengan gelar SH, M.Si dan MH yang disandang Buto Terong, Gareng dan Petruk memberikan pemaknaan yang sekenanya. SH diartikan sebagai “Sobo Hotel” (mengingat di hotel) atau juga “sarjana hiburan”. M.Si dimaknai sebagai “Magister Selingkuh Indah”. Sedangkan MH diartikan dengan “Mlebu Hotel” atau “mesum hangat”. Selanjutnya Gareng Petruk menyebut perilaku Buto Terong yang berkenan menerima hadiah gelar tanpa mau menempuh studi tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum dan pembohongan masyarakat:

“Ooooo dadi kowe sak iki kepetung pejabat tinggi sing wis nerak hukum. Kowe wis kumowani tumindak pembohongan public. Apus-apus... wis ngene wae Reng!. Yen Buta Terong iki dijar ne, iki mengko kerusakan dunia pendidikan tambah ndodro ora karu-karuan, iki becike ayo dirangket wae!”

Sedangkan dalam “UKG (Ujian Kur Guyon)”, Ki Setyo Racethocarito mengkritisi kemajuan negeri Ngastina yang ternyata adalah semu dan kegagalan tanpa karya (Handono, 2013: 239). Kenyataan itu disebabkan banyak faktor yang diantaranya adalah kebiasaan buruk guru dan murid. Dalam mempertanggung jawabkan sertifikasi yang mengambil bentuk beban kinerja, para guru sering melakukan manipulasi dalam data dan karya. Para murid sering tidak jujur dan menyontek serta bermalas-malasan. Ki dalang menyatakan:

Prabu Duryudana sungkawa penggalihe awit pawiyatan luhur kang diajab bisa nyengkuyung kemajuaning negara Ngastina pranyata gagal tanpa karya. Sebab lan musababe durung kwuningan. Ananging yen dideleng saka adat kabiyasane guru lan siswa Kurawa bisa dipestekake dene kemunduraning pawiyatan mau hiya jalaran sipat keset lan seneng nerak tatanan sing dilakoni dening para guru lan pejabatate. Mula ora aneh menawa pawiyatan mau mung kanggo srana lelumpuk bandha lan arta wae

kanthi cara korupsi lan manipulasi. Senadyan ta pengasilane para guru wis diundakake lumantar sertifikasi guru sing cacahé agawe meri para PNS liyane. Babar pisan gaji sing mayuta-yuta mau ora bisa ngowahi sipat aras-arasen lan nerak tatanan mau . Pranyata pendidikan tambah rusak, korupsi, kolusi, lan nepotisme soyo ndodro moral para muda taruna tambah bubrah ora karuan.

Keberadaan UKG (ujian kompetensi guru) yang diprogram untuk mengevaluasi kompetensi guru pasca digulirkannya sertifikasi, ternyata tidak berdampak apa-apa terhadap kelangsungan sertifikasi. Tidak ada sangsi bagi guru yang nilai UKG-nya *jeblok*, berupa pemberhentian tunjangan sertifikasi baik sementara atau selamanya. Jika ujian tersebut tidak berdampak apa-apa, maka istilah UKG bisa saja diplesetkan menjadi “ujian kur guyon”, “ujian koyo gombal”, karena guru memang tidak mengambil pelajaran di balik penyelenggaraan evaluasi kompetensi ini. Usulan untuk mengulang penyelenggaraan UKG-pun akan sia-sia. Sang dalang menuturkan:

“Waaa... percuma menawa ujian ora ana pengaruhe karo sertifikasi..., mula aku njaluk, UKG sing arep teko mengko awehana sanksi kanggo guru-huru sing bijine ora entuk pitung puluh munggah. Sertifikasine lerenana, cabuten, lan dhuwit sing wis ditampa kon mbalekne kabeh... Lan aku njaluk istilah UKG diganti wae. Sebab UKG sing wis kaleksanan mau diplesetake Ujian Koyo Gombal, Ujian Kur Guyon, dadi pantes menawa guru-guru mung guyon nalika nggarap soal-soal mau. Kapindone soal sing mbok gawe biyen katon ora berkwalitas... ditambah maneh computer sing mbok nggo ngoreksi salah kabeh....”

C. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Artikel-artikel *Wayang Kemplo Gerr* yang ditulis oleh Ki Setyo Handono jika dicermati maka akan dapat dipahami bahwa tulisan tersebut tidak berangkat dari “ruang kosong”. Ada akar peristiwa yang dirujuk dan menginspirasi tema tulisannya. Karena berbasis peristiwa

lokal, maka arah dan sasaran kritik mudah ditebak, sehingga tampak jelas bagi para pembaca media koran, siapa yang sedang “dibidik” oleh kritiknya. Kesan *satir* yang muncul dari sebuah kritik sosial yang datang dari dunia wayang terhadap “dunia nyata”, menjadi berkurang dan sebaliknya berubah seakan menjadi kritik langsung terhadap subjek setiap peristiwa sosial.

Bahasa artikel yang digunakan lugas dan tegas dan kadang terkesan “kasar” atau vulgar. Ungkapan-ungkapan kritik sang dalang terkesan *thok-ngoh*. Latar belakang sang dalang yang asli Pacitan dan berkultur Jawa, dimungkinkan turun mempengaruhi pilihan bahasa tulis dan tuturan kritik. Selain itu, tradisi seniman yang sering kali *ceplas ceplos* dan apa adanya, turut mendorong penulis artikel *Wayang Kemplo* untuk menuliskan kritiknya tanpa hambatan dan beban apapun,

Memposisikan diri sebagai pihak yang melakukan kritik -- seperti yang diperankan oleh sang dalang-- perlu energi yang besar. Dalam masyarakat, posisi seseorang yang menyampaikan kritik masih diidentikkan sebagai orang yang berposisi dan berseberangan dengan pihak yang dikritisi, sehingga seringkali dimusuhi, padahal sebuah kritik tidak selamanya lahir karena “permusuhan”, dan sebaliknya bisa jadi dikarenakan kasih sayang atau karena semangat amar *makruf nahi mungkar* seperti yang dituturkan ki dalang Setyo Racethocarito. Jika semua kritik dimusuhi atau bahkan diberangus, maka bisa jadi tidak ada koreksi maupun protes terhadap setiap laku ketidakadilan atau penyelewengan yang terjadi.

Meski ada upaya “penjinakan” berupa intimidasi terhadap penulis Wayang Kemplo dan pelarangan terbit beberapa artikel, hal tersebut tidak menyurutkan langkah sang dalang untuk terus menuangkan kritiknya terhadap semua hal yang dianggap tidak pas. Intimidasi yang didapat dijawab dengan semakin banyaknya karya dan artikel yang lahir di berbagai media lain.

Artikel Wayang Kemplo sejatinya hanyalah humor dan banyol sang dalang untuk mengungkapkan perasaan dan keprihatinannya terhadap berbagai peristiwa. *Geguyonan parikeno*. Karenanya, menanggapi secara serius atau penuh emosi kritik yang terkandung di dalamnya merupakan kebodohan yang nyata. Jika ada relevansi kritik bagi seseorang, hendaknya hal tersebut menjadi bahan refleksi, evaluasi dan perbaikan diri. Jika tidak, maka anggaplah bahwa yang dalang sedang *ngelantur* dalam menuturkan ceritanya. Bukankah sang dalang memang telah menyebut dirinya sebagai “*Racethocarito*” atau dalang yang ceritanya tidak jelas karena seperti orang mengomel?

KESIMPULAN

Diantara hal yang dapat disimpulkan oleh penelitian ini adalah:

1. Masyarakat khususnya dunia pendidikan merupakan komunitas yang terus berkembang dan berproses. Sebagai komunitas yang berhubungan dengan pendidikan seharusnya mereka akrab dengan nilai-nilai kebajikan berupa kejujuran, kerja keras, disiplin, dan

semisalnya. Kenyataannya tidaklah demikian. Masyarakat akademis seringkali menunjukkan kebohongan, kemalasan, dan ketidakdisiplinan lewat gelar akademik *tumbasan*, budaya menyontek atau bahkan karya ilmiah palsu. Realita tersebut menyulut keprihatinan sang dalang untuk menyentilnya lewat *wayang kemplo*-nya.

2. Kritik Wayang Kemplo ditanggapi beragam. Ada yang menanggapinya secara serius dan bahkan berusaha melakukan intimidasi terhadap penulis terutama para pejabat yang terkritisasi. Banyak pula yang menganggapnya sebagai bacaan hiburan dikarenakan banyaknya humor dan banyolannya, sehingga kehadiran tulisan tersebut selalu dinantikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmaningtyas. 2004. *Pendidikan Yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Penerbit Galung Press.
- Fatchan, A, 2005, *Konsep dan Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: PPS UM Malang.
- Freire, Paulo. 2002. *Politik Pendidikan (Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- gusdur.net/Opinion/Detail/?id=80/hl=id/Agama_Sebagai_Kritik_Sosial
- Handono, Setyo, 2013. *Wayang Kemplo Gerr (Potret Kerusakan Sebuah Negeri)*. Ponorogo.
- Iman, Nurul, 2013. *Masyarakat Akademis Dalam Bingkai Wayang Kemplo (Studi Kritik Sosial Ki Setyo Handono Dalam Koran Mingguan Media Mataraman)*. Ponorogo: FAI Unmuh.
- Jamil, M. Mukhsin, et.al, 2007, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: Walisongo Mediation Center.
- Kadi, dkk., 2009. *Otonomi Pendidikan di Era Ekonomi Daerah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.

- Martono, Nanang. 2010. "Kritik Sosial Terhadap Praktik Pendidikan dalam Film Laskar Pelangi" dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 3 Nomor 16 Mei 2010.
- Muhajir, Noeng, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Smith, William A., 2001, *Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire*, terj. Agung Prihartono, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukirno, Hadi, 2012, "Perkembangan Wayang" dalam <http://www.hadisukirno.com/artikel-detail?id=258>
- Suseno, Franz Magnis, 1992, *Filsafat kebudayaan politik: butir - butir pemikiran kritis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wiraharjo, Indhar Wahyu.2011. *Wayang Durangpo: Kritik Sosial Dalam Karya Sujiwo Tejo di Harian Jawa Pos*. UGM: Tesis.
- Yusuf, Moh. Asror, et.al, 2006, *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global*, Yogyakarta: Ircisod.